

UJIAN NASIONAL (UN), MASIH PERLUKAH?

Oleh:

Setyo Hartanto

Widyaiswara LPPKS

Setyohartanto@lppks.org



ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak baik dan dampak buruk (kelebihan dan kekurangan) Pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia, sehingga diketahui pula masih perlukah Ujian Nasional ini diberlakukan lagi tiap-tiap tahun? Hal ini berdasarkan berbagai penjelasan bermacam-macam pertimbangan dan kajian-kajian di dalam Ujian Nasional itu sendiri.

Ujian nasional lebih tepat jika berkomplementer dengan Ujian Sekolah. Ujian Nasional hanya sebagai gagasan dan tetap hanya sebagai pemetaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) jangan sampai dijadikan standar kelulusan tingkat nasional.

Ujian Nasional berdasarkan filosofi pendidikan yang berpedoman dengan falsafah Pancasila menunjukkan adanya kepentingan menyelamatkan salah satu ciri khas dan budaya bangsa Indonesia, dengan alasan keterkaitan atau tidak terpisahkannya antara ujian nasional dengan tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: Ujian Nasional, Ujian Sekolah, Tujuan Pendidikan Nasional

ABSTRACT

This paper aims to determine the effects of good and bad effects (advantages and disadvantages) Implementation of National Examination in Indonesia , is it necessary to note also the National Examination is applied again each year ? It is based on a variety of explanations various considerations and studies at the National Examination itself .

The national test is more appropriate if berkomplementer with Exams . National exams just as the idea and remained only as mapping the National Education Standards (NES) should not be used as a passing standard national level .

National Exam based educational philosophy guided by the philosophy of Pancasila shows the interest of saving one of the characteristics and culture of Indonesia , with reason or inseparable connection between the national exam with national education goals .

Keywords : National Exam , Exams , National Education Goals

1. PENDAHULUAN

Landasan filsosofi pendidikan di Indonesia relatif sama dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini beralasan karena Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai falsafah Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofi mencerminkan ciri khas dan kepribadian Bangsa Indonesia dengan demikian falsafah Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan Indonesia.

Ujian Nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan nasional, Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional, maka dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menunjukkan feed back dan mengembalikan pelaksanaan UN ke arah yang prosedur yang benar, monev ini dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Hasil evaluasi akan dijadikan dasar perubahan sistem ujian ke arah yang lebih baik, dan hal tersebut secara otomatis juga akan mengubah metode pembelajaran ke arah yang lebih baik pula.

Kenyataan yang terjadi bertahun-tahun pelaksanaan Ujian Nasional dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat menengah masih sering terjadi permasalahan-permasalahan yang dijadikan polemik di tiap-tiap forum-forum sosial maupun forum-forum pemerintahan. Hal ini terjadi di lapangan memang sesuai dengan kenyataan dan laporan masyarakat luas tentang kendala-kendala yang ada, *stakeholder* yang terkait atau kendala infrastruktur, persiapan penyelenggaraan, sampai pada kendala distribusi soal, maupun penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka muncul pertanyaan klasik dan selalu dilontarkan dalam forum-forum diskusi maupun seminar, Masih perlukah UN? Oleh karena itu melalui tulisan ini saya akan mendeskripsikan konsep, sejarah Ujian Nasional, dan menyoroti kelemahan dan kelebihan pelaksanaan UN, Tinjauan UN.

2. KONSEP UJIAN NASIONAL (UN)

Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk *mandated examination* (ujian yang diamanatkan atau di bawah pengawasan) yang didesain untuk menggambarkan tingkat pencapaian keseluruhan sistem pendidikan, bukan pencapaian individu tertentu. Menurut Miller (2009), *mandated examination* memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

- a. Hasil ujian dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan pendidikan untuk mendeteksi kelemahan yang dimiliki.
- b. Sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam bidang pendidikan.
- c. Memberikan informasi mengenai kondisi terkini dan kemajuan peserta didik serta kualitas sekolah.
- d. Memberikan hasil ujian yang akuntabel guna memotivasi guru dan peserta didik untuk berusaha lebih baik.

Menurut Kellaghan dan Greaney (2001), tujuan pelaksanaan ujian negara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan standar pendidikan untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja
- b. Untuk mempertahankan standar pendidikan yang sudah dimiliki.
- c. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan alokasi sumber daya pembelajaran untuk sistem pendidikan secara umum, sekolah-sekolah yang memiliki karakteristik khusus dan sekolah berprestasi.
- d. Untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk menetapkan akuntabilitas prestasi belajar peserta didik.
- e. Ujian negara dilakukan sebagai bagian dalam gerakan modernisasi, di bawah pengaruh pemberi modal, yang tidak terlalu memperhatikan kesinambungan dan tidak memahami bagaimana memanfaatkan informasi yang diperoleh.
- f. Untuk mengubah keseimbangan pengawasan dalam sistem pendidikan.
- g. Untuk mengimbangi lemahnya praktek penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh para guru.

Terdapat konsekuensi yang muncul apabila Ujian Nasional tidak dilakukan, Ebel (1980) menyebutkan beberapa konsekuensi yang muncul jika ujian negara tidak dilakukan, yaitu:

- a. Dorongan dan penghargaan atas usaha seseorang untuk belajar akan menjadi lebih sulit.
- b. Kesuksesan program pendidikan kurang dapat dinyatakan sebagai tujuan dan pencapaian kurang dapat dibuktikan.
- c. Keputusan-keputusan penting terkait dengan masalah kurikulum dan metode tidak diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat melainkan lebih berdasarkan pada perkiraan dan cenderung plin-plan.
- d. Kesempatan menempuh pendidikan tidak berdasarkan bakat dan prestasi namun lebih berdasarkan keturunan dan pengaruh yang dimiliki.
- e. Hambatan kelas sosial kurang dapat ditembus.

3. SEJARAH UJIAN NASIONAL

Dalam pelaksanaannya, sistem ujian akhir memang tidak pernah lepas dari evaluasi dan penyempurnaan. Sejarah mencatat beberapa kali perubahan sistem ujian hingga saat ini kita mengenalnya sebagai UN.

a. Tahun 1965-1971

Sistem ujian akhir yang dilaksanakan disebut Ujian Negara dan berlaku untuk semua mata pelajaran. Pada periode ini, ujian masih tersentralisasi sehingga pelaksanaannya masih ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Tahun 1972-1979

Pada periode ini, ujian negara dihapuskan dan diganti dengan ujian sekolah. Sistem ini memberikan kewenangan pada tiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian akhir masing-masing. Soal dan pemrosesan hasil pun diserahkan kepada pihak sekolah. Peran pemerintah pusat hanya menyusun dan mengeluarkan pedoman ujian yang bersifat umum.

c. Tahun 1980-2000

Diberlakukan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan serta memperoleh indikator (nilai) yang bermakna “seragam” agar dapat menjadi bahan perbandingan antar sekolah. Dalam penyelenggaraannya, Ebtanas dirasakan mempunyai banyak kelemahan baik dari segi akademis maupun teknis penyelenggaraan. Kelemahan-kelemahan yang dijumpai, antara lain:

- 1) ketidakmampuan mengukur pencapaian prestasi akademik secara komprehensif
- 2) pengujian dilakukan secara temporal dan dalam waktu yang singkat
- 3) proses pembelajaran tereduksi dan hanya berorientasi pada Ebtanas,
- 4) Ebtanas hanya mampu mengumpulkan informasi terkait dengan kemampuan kognitif saja.

d. Tahun 2001-2004

Mengingat kelemahan-kelemahan yang muncul akibat Ebtanas, pada periode ini sistem ujian akhir diganti dengan Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan yang menonjol antara Ebtanas dengan UAN ada pada cara penentuan kelulusan siswa. Dalam Ebtanas, kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi antara nilai semester I, nilai semester II dan nilai Ebtanas murni. Sedangkan dalam UAN, kelulusan siswa ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.

e. Tahun 2005 - KTSP

Untuk mendorong tercapainya wajib belajar yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan ujian nasional untuk tingkat SMP dan SMA atau sederajat. Sedangkan untuk tingkat SD atau sederajat Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) baru diterapkan pada tahun 2008 dan kini nama yang digunakan adalah UN.

f. Kurikulum 2013

Perancangan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam Kurikulum 2013 dilakukan melalui Ujian Nasional dan ujian mutu Tingkat Kompetensi, dengan memperhatikan hal-hal berikut.

1) Ujian Nasional

Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Hasil UN digunakan untuk:

- a) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- b) salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya;
- c) pemetaan mutu; dan
- d) pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu.
- e) Dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah.
- f) Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.

- g) Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi
- a) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan oleh Pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan.
 - b) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran.
 - c) Instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan Ujian Mutu Tingkat Kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagaimana hasil studi lain dalam skala internasional.

4. TINJAUAN-TINJAUAN UJIAN NASIONAL

a. Tinjauan Mekanisme Dan Prosedure Penilaian

Mekanisme dan prosedur penilaian dalam KTSP 2013 dapat penulis gambarkan sebagai berikut;



Mekanisme penilaian dapat diterjemahkan sebagai *feedback* (umpan balik) dari siswa tentang ketercapaian pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai indikator keberhasilan guru sebagai agen pembelajaran, hal ini bila penilaian tersebut jika dilakukan oleh guru yang mengajar mata pelajaran tertentu. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh sekolah merupakan *feedback* dari siswa dalam kurun waktu selama belajar di sekolah tersebut sehingga sekolah dapat memberikan predikat maupun prestasi sebagai hasil anak didik di akhir tahun kelulusan.

Pemerintah maupun Lembaga yang independen melakukan penilaian terhadap sekolah maupun peserta didik pada khususnya merupakan upaya mendapatkan pemetaan kualitas pembelajaran di tiap-tiap sekolah dan daerah, sehingga penilaian yang dilakukan termasuk bagian utama mengetahui pencapaian standar nasional pendidikan tiap-tiap sekolah di daerah-daerah. Tujuan utama pemerintah mengetahui hasil UN tiap sekolah sebagai

Selain mekanisme dan prosedur penilaian menjadi pertimbangan utama dalam perlu tidaknya pelaksanaan Ujian Nasional juga masih dibutuhkan beberapa pertimbangan lagi tentang berbagai tinjauan ranah dan tinjauan fungsi atas pemeberlakuan adanya Ujian Nasional.

b. Tinjauan Ranah

Ada 2 macam tinjauan ranah ujian nasional, yaitu;

1) Ranah Idealisme

Bentuk Idealisme pucuk pimpinan dalam melaksanakan pengorganisasian suatu kelembagaan tertuju dalam tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional, bentuk keberhasilan salah satunya adanya prestasi bebas buta aksara, atau prestasi tingkat internasional dan seterusnya. Sehingga Ujian Nasional jika ditinjau dari ranah idealisme sangat berkomparasi dengan politik praktis pendidikan.

2) Ranah Implementasi

Keberhasilan implementasi tujuan pendidikan nasional dan kurikulum nasional sangat ditentukan adanya prestasi tiap-tiap satuan pendidikan memperoleh nilai-nilai dalam Ujian Nasional sehingga perlu pengembangan maupun implementasi lebih lanjut dari kurikulum tersebut atau daya serap kurikulum tersebut di lapangan.

c. Tinjauan Fungsi

1) Fungsi Benchmarking

(IBM dalam Sri Winarni) \Rightarrow Benchmarking merupakan suatu proses terus-menerus untuk menganalisis tata cara terbaik di dunia dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan dengan prestasi dunia. Dengan adanya Ujian Nasional bertujuan untuk mengambil pengalaman terbaik agar diperoleh pembelajaran tentang tujuan pendidikan nasional, yang diakui dunia pendidikan internasional.

2) Fungsi Tes

Banyak sekali keputusan pendidikan yang diambil berdasarkan hasil tes prestasi belajar, misalnya pemberian nilai suatu mata pelajaran, penentuan lulus atau tidaknya siswa, perlu atau tidaknya penyelenggaraan kegiatan belajar tambahan, perlu tidaknya pengulangan suatu mata pelajaran tertentu dan lain-lain. Azwar (2007) mengemukakan bahwa berbagai macam keputusan pendidikan itu menempatkan tes prestasi belajar dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi penempatan, fungsi formatif, fungsi diagnostik dan fungsi sumatif. Dalam hal fungsi sumatif, Azwar (2007) memaparkan bahwa penggunaan hasil tes prestasi untuk memperoleh informasi mengenai penguasaan pelajar yang telah direncanakan sebelumnya dalam suatu program pelajaran. Hasil tes sumatif dapat dipakai untuk menentukan apakah dengan nilai yang telah diperolehnya itu siswa dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus pada program pendidikan tersebut atau apakah dapat melanjutkan ke jenjang program yang lebih tinggi.

Tes hanya memenuhi aspek kognitif, dalam tes ada tes formatif dan tes sumatif. Sumatif merupakan tes yang dilakukan di akhir waktu pembelajaran. Tes formatif berfungsi pemantauan materi pembelajaran sebagai *feedback*, bahan remedi, dan membantu peserta didik.

d. Tinjauan Kebijakan Pemerintahan

Di tengah berbagai polemik yang muncul terkait penyelenggaraan Ujian Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Muhammad Nuh) menyatakan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan Ujian Nasional yang baik dan kredibel. Terdapat empat kunci keberhasilan Ujian Nasional yang baik dan kredibel, yaitu:

- 1) Ujian Nasional dijamin kerahasiaan dan keamanannya. Jika berkas bocor atau hilang maka kredibilitas Ujian Nasional dipertaruhkan.
- 2) Distribusi tepat waktu, tepat jumlah dan tepat bahan yang diujikan.
- 3) Kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional dengan cara meminimalisir terjadinya kesalahan, seperti kesalahan soal.
- 4) Sistem evaluasi harus dipastikan agar nilai rapor bisa menjamin bahwa nilai tersebut mencerminkan kemampuan peserta didik yang bersangkutan.

Jika keempat poin tersebut dilakukan maka fungsi pelaksanaan Ujian Nasional dapat terwujud yaitu dapat menggambarkan atau memetakan pencapaian seluruh sistem pendidikan.

Mendikbud (16-01-2015) mengatakan; “UN Sudah Menjadi standar, merupakan instrumen Domestik Yang Berlaku di Internasional. Kita Punya Ukuran Lokal Yang diakui Beroperasi internasional.”

e. Tinjauan Survey

Hasil Survey Melalui Angket Terhadap 200 Orang sampel Kepala Sekolah SMP Negeri Dan Swasta wilayah se-Provinsi Jawa Tengah, tentang indikator pertanyaan angket mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Sekolah dalam Ujian Nasional, secara garis besar *checklist* berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuannya dalam “Melihat Langsung Dan Atau Tidak Melihat Langsung Adanya Kecurangan UN” serta pertanyaan-pertanyaan tentang Upaya Kepala Sekolah sebagai leader di sekolahnya dalam rangka Pencegahan terjadinya Kecurangan UN.

Angket dilaksanakan pada akhir bulan Juni tahun 2013 data dikumpulkan dan diolah oleh Setyo Hartanto (terlampir), menyimpulkan dan menyebutkan hasil survey membuktikan bahwa 26% responden mengetahui adanya/terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah-sekolah baik mengetahui secara langsung dan tidak langsung melalui media massa. Informasi-informasi dan saran pendapat dari sejumlah responden ($\pm 20\%$ dari jumlah responden/terlampir) menunjukkan adanya motivasi dan kepedulian sebagian besar kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan.

5. PENUTUP

a. Simpulan

Tulisan di awal telah membeberkan bahwa Ujian Nasional berdasarkan filosofi pendidikan yang berpedoman dengan falsafah Pancasila menunjukkan adanya kepentingan menyelamatkan ciri khas dan budaya (salah satu) bangsa Indonesia, dengan alasan keterkaitan atau tidak terpisahkannya antara ujian nasional dengan tujuan pendidikan nasional.

Apabila terjadi permasalahan tentang Ujian Nasional yang patut disalahkan itu adalah sistem dan pelaksanaannya serta personal-personal yang tidak profesional, bukan ujiannya. Karena ujian dimaksudkan untuk membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan pembelajarannya.

Ujian nasional lebih tepat jika berkomplementer dengan Ujian Sekolah. Ujian Nasional hanya sebagai gagasan dan tetap hanya sebagai pemetaan SNP jangan sampai dijadikan standar kelulusan.

b. Saran

Stakeholder agar bersatu dan memegang teguh Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional tiap-tiap tahun penyelenggaraan, agar dapat menumbuhkan generasi emas Indonesia.

Sebaiknya Ujian Nasional diarahkan untuk pemetakan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (Pembiayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Proses, Penilaian, Kelulusan, Isi, Sarana Prasarana) bukan sebagai penentu kelulusan peserta didik.

Kepala sekolah/madrasah yang tergabung dalam MKKS perlu membenahi dalam perencanaan dan pelaksanaan UN atau EN (Evaluasi Nasional=istilah baru) tidak membuka peluang adanya kecurangan UJIAN tingkat NASIONAL.

Percetakan yang menjadi pelaksana proyek pengadaan beserta distributor soal-soal UN secara kelembagaan dan personalia perlu menanda tangani pakta kejujuran pula.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*,. Jakarta. Lembaran Negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2003
- Hadi S. 2014. Ujian Nasional Dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan Pragmatisme. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, IV(01), 283-294.
- <http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/tentang-kemdikbud>, Oktober 2014.
- Permendikbud No 81A Tahun 2013. Implementasi Kurikulum*. Kemendikbud. Jakarta. <http://sriwinarni-sriwinarni86sriwinarni.blogspot.com/2010/06/patok-duga-benchmarking.html> 16 Des 2014. 1.41.
- <https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI?fref=nf>, Januari 2015.

- A. Hasil Survey Melalui Angket Terhadap 200 Orang sampel Kepala Sekolah SMP Negeri Dan Swasta wilayah se-Provinsi Jawa Tengah, Tentang indikator Melihat Langsung Dan Atau Tidak Langsung Adanya Kecurangan UN Serta Upaya Kepala Sekolah dalam Pencegahan Kecurangan UN di Tahun 2013, menyebutkan hasil bahwa 26% responden mengetahui adanya/terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional.
- B. Kotak Informasi dari Responden

NO	INFORMASI RESPONDEN TENTANG KECURANGAN UJIAN NASIONAL (UN)
1	Tingkat kecurangan ujian diakibatkan tingkat kepengawasan bagi petugas pengawas, bila kepengawasan ketat/disiplin sesuai dengan tata tertib yang berlaku, Diberikan sanksi yang tegas bagi para peserta ujian dan bagi para petugas ujian yang melanggar tata tertib.
2	Adanya informasi jaringan kunci jawaban UN yang terkoordinasi khususnya di sekolah MTs. kurang lebih sdh berjalan 3 tahun lebih
3	Media masa, Obrolan dengan teman adanya kecurangan UN.
4	Masih adanya contek mencontek
5	Ada beberapa sekolah yang mengkondisikan siswa yang pandai membantu siswa yang kurang pandai, dan ada sekolah tertentu yang dikondisikan secara regional
6	Ada sebagian anak memuat rangkuman untuk mencontek
7	Adanya kunci jawaban lewat sms
8	Pemeriksaan siswa saat masuk ruangan ujian dilaksanakan oleh petugas dengan baik, dan kerjasama dalam mengerjakan soal juga diawasi dengan baik
9	Di sekolah kami jujur dalam melaksanakan setiap ujian, tes, ukk, uas dan ulhar.
10	Lewat media tv (mengetahui adanya kecurangan)
11	Ujian Nasional bisa jadi memang ada kecurangan, setuju pelanggaran harus di tindak tegas
12	Di sekolah-sekolah swasta sering terjadi kecurangan
13	Melihat langsung kecurangan tidak pernah tetapi mendengar, kemudian dilihat dari hasil UN mungkin mereka curang
14	Kunci jawaban UN banyak beredar di kalangan siswa
15	Dengan adanya paket soal berkode, pelajar tidak dapat melakukan kecurangan karena setiap siswa mendapatkan paket soal yang berbeda-beda.
16	Agar tidak curang, ujian nasional tidak menentukan kriteria lulus, tetapi cukup untuk standar mutu pendidikan nasional
17	Pengawas ujian nasional tidak tega jika harus menuliskan kecurangana anak dalam berita acara, Pengawas UN scara silang tidak menjamin pelaksanaan UN dapat berjalan sesuai kehendak kementerian (jujur) karena pengawas kasihan jika tidak lulus, peserta ujian walaupun bukan muridnya sendiri.
18	Menurut pernyataan siswa yang telah lulus ujian dan telah meneruskan sekolahnya di sekolah lanjutan mereka pernah ditawari kunci jawaban seseorang yang datang ke depan sekolah, karena mereka berpendapat orang tersbut menipu maka tawarannya tak dihiraukan. Ada pilihan tertentu di tempat lain di lembaga pendidikan (tidak Dinas P & K) setiap UN menyediakan kunci jawaban untuk anak-anak di lingkungan tersebut, ternyata kunci jawabannya: akurat.
19	Prestasi penting, tetapi kejujuran lebih utama.
20	Stop kecurangan dalam pelaksanaan UN dengan mengurangi bobot nilai UN dalam kelulusan
21	Banyak ditemukan kunci jawaban UN
22	Di tingkat TK masih kental

23	Disinyalir ada/beredar kunci jawaban. Disinyalir ada naskah tidak dijaga secara ketat
24	Ada info siswa SLTA membeli kunci jawaban dengan biaya gotong royong, dibebankan pada siswa yang mau membeli, per anak Rp. 100.000,-
25	Kecurangan UN terjadi karena UN bukan lagi sebagai alat ukur tetapi sebagai penentu kelulusan maka selamanya akan tetap menimbulkan kecurangan karena acuan UN antara sekolah yang di kota dengan vasilitas lengkap untuk pilihan materinya disamakan dengan sekolah yang di pedesaan dengan fasilitas seadanya. apalagi sekolah dibawah binaan kemenag yang penting bisa mencari siswa dan UN selalu 100% selalu berani melakukan usaha dengan berbagai cara.
26	Perlu disosialisasikan kepada guru dan siswa, Membentuk tim sukses UN, Menerapkan strategi sukses UN
27	Kecurangan UN hampir di seluruh jenjang sekolah, dan banyak yang menganggap kecurangan ujian nasional hal-hal yang umum saja, Ada daerah-daerah yang menghendaki UN bagus tapi tak berfikir asal usulnya yang fatal di masa depan, Hal ini kadang-kadang di kaitkan dengan politik untuk penguasa-penguasa tertentu yang seolah-olah berhasil dalam pendidikan
28	Meski sulit untuk dibuktikan tetapi ada daerah atau sekolah tertentu yang mengkondisikan secara sistematis untuk memperoleh nilai UN bagi pesertanya
29	Hukum harus ditegakkan, Ada sekolah yang curang tapi tidak kena hukum.
30	Kecurangan yang ada dapat diatasi dengan memperbanyak variasi soal antar individu peserta UN
31	Adanya isu beredarnya kunci jawaban UN di luar sekolah
32	Kecurangan terjadi karena tekanan dari atasan. Bila kepala daerah, kepala dinas berkomitmen untuk jujur maka kepala sekolah, guru dan siswa akan jujur pula.
33	Masih ada kecurangan
34	Di lintas semua pelaku pendidikan pasti merasa malu manakala siswanya ada yang tidak lulus

C. Kotak Saran dari Responden

NO	KRITIK DAN SARAN RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
1	Di pihak siswa diberikan pembinaan mental bagi peserta didik secara rutin tentang pelaksanaan ujian dan hasil-hasil ujian, pada umumnya bagi peserta didik mempunyai pandangan bahwa penentuan keberhasilan sekolah hanya pada hasil akhir (ujian). Akhirnya dengan berbagai cara supaya peserta didik melakukan tindakan-tindakan agar hasil akhir berhasil dengan baik, Di pihak penyelenggara mengkombinasikan bentuk soal, tidak hanya pilihan tetapi bisa dipadukan dengan bentuk isian, sehingga peserta didik tidak spekulasi dalam menjawab soal.
2	Naskah UN sebagai dokumen negara agar benar-benar dijaga kerahasiaannya, dan nilai UN bukan satu-satunya penentu kelulusan
3	Menumbuhkan sikap tanggungjawab dan kejujuran kepada siswa
4	Seharusnya jangan sampai ada kecurangan
5	Agar tetap dipertahankan dengan sistem satu ruangan yang berbeda paket soalnya
6	Menguatkan keyakinan peserta didik kepada Allah maha melihat.
7	Bila UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, kecurangan dalam ujian nasional tidak akan terjadi
8	Tanamkan kepercayaan anak, tanamkan nilai kejujuran, dan prosentasi kelulusan nilai ujian nasional diperkecil
9	Diadakan pembinaan khusus, yaitu mental yang harus didahulukan
10	Perlu pakta integritas kepada semua pihak yang terlibat dalam ujian nasional, disertai sanksi yang jelas untuk efek jera.

11	Tidak perlu adanya tim sukses, tetapi tim persiapan menghadapi ujian nasional dengan menitikberatkan pada kualitas belajar mengajar. Dan mengajar bersama-sama putra-putrinya sejak kelas VII untuk jujur, percaya diri, dalam penilaian baik UK, U harian, UTS maupun UAS. sehingga sejak dini peserta didik siap mensukseskan program tersebut. Kepala sekolah sering berkomunikasi dengan kelas IX untuk meraih sukses lewat usaha yang baik, Sebagai bukti SMPN 1 Magelang menjadi terbaik nasional.
12	Kepengawasan ujian nasional diperketat untuk validnya hasil ujian nasional. Kecurangan adalah bentuk kegagalan dari kepribadian bangsa maka siapapun yang melanggar aturan segera diberi sanksi tegas.
13	Laksanakan UN dengan 20 paket soal. Dan beri sanksi tegas bagi yang melaksanakan UN dengan tidak jujur
14	Dibuat beda paketnya seperti tahun 2012/2013
15	Kecurangan dalam UN tidak hanya terjadi pada siswa akan tetapi sudah menjadi sistem, mulai dari kepala daerah sampai tingkat kasi/kabid, karena tolok ukur keberhasilan ujian nasional sampai sekarang masih pada hasil bukan mutu penyelenggara dan mutu lulusan.
16	Sebaiknya siswa diberi pengertian untuk jujur
17	Pejabat instansi berwenang harus mengadakan sidak terutama di sekolah2 swasta pada saat UN
18	Masih tetap ada UN sebagai pemetaan dan diawasi silang dengan sekolah lain
19	Setiap ruang UN dipasang CCTV, bagi pelajar yang curang dalam mengerjakan UN dan tertangkap CCTV diberi sanksi tidak lulus UN
20	Apabila UN diselenggarakan lagi maka paket soal berkode dilanjutkan karena dapat mengurangi kecurangan dalam mengerjakan soal
21	Masih perlu diperlukan pengawas independen
22	Harus ada penanaman kejujuran sejak diri pada siswa yang diawali dengan pembelajaran di kelas
23	Ditanamkan kepada pengawas UN untuk melaksanakan tugas sesuai dengan POS. Pengawas UN tak perlu ragu menulis kecurangan peserta UN tidak lulus tidak apa-apa paling-paling satu kali siswa tidak lulus untuk seterusnya akan berhati-hati dan adik-adik kelasnya akan terbiasa jujur.
24	Pengawasan UN antara kecamatan agar ada kehati-hatian sekolah tak melakukan kecurangan. Sanksi yang tegas dan nyata (dipecat) bagi PNS yang melakukan kecurangan.
25	Jangan jadikan hasil UN sebagai satu-satunya alat untuk seleksi ke sekolah yang lebih tinggi ini memacu sekolah dan siswa mencari segala cara agar nilai UN tinggi.
26	1) UN tetap dilaksanakan terus, 2) Kriteria kelulusan bertahap dinaikkan, 3) Bobot kesukaran bertahap dinaikkan, 4) Jenis soal dan model soal diupayakan 20 model yang berbeda.
27	Ujian nasional diperlukan adanya, bobot penentu kelulusan perlu dikurangi karena nilai UN merupakan gambaran singkat kompetensi siswa pada akhir tahun, Kisi-kisi UN mohon disosialisasikan awal tahun pelajaran
28	Nilai Ujian nasional jangan dijadikan sebagai satu-satunya ukuran, terlebih untuk seleksi masuk sekolah
29	UN tidak perlu dibuat seperti sakral tetapi dilaksanakan sewajarnya
30	Perketat pengawasan terhadap jalur-jalur yang dilalui oleh soal (percetakan, distribusi soal)
31	Sanksi yang tegas bagi pelanggar UN. Dan UN tidak dijadikan patokan penilaian dan kelulusan prestasi sekolah
32	Upayakan monitoring secara ketat
33	Ujian Nasional sangat diperlukan tapi tidak merupakan mutlak penentu kelulusan agar dilaksanakan jujur dan tidak curang
34	Ujian Nasional tidak untuk peringkat sekolah. tidak ada ujian nasional
35	Kunci jawaban sampai bocor, diperketat pengawasannya, informasi banyak SLTA yang membeli kunci jawaban UN
36	UN tetap dilaksanakan tapi bukan sebagai penentu kelulusan artinya kebijakan ketentuan kelulusan model sikap cukup bijaksana

37	Sebagusnya UN boleh dilaksanakan tapi hanya sebagai tolok ukur dan pemetaan saja bukan penentu kelulusan sehingga kesenjangan antara sekolah yang berfasilitas lengkap dengan yang berfasilitas seadanya terlihat perbedaannya. Apalagi wajar 9 tahun merupakan program wajib, mengapa harus dilakukan UN juga tidak ada jaminan langsung diterima di sekolah idaman, dan mereka yang jaminan langsung diterima di sekolah lanjutan berikutnya dengan segala resiko trik dan sekolah yang dihadapi.
38	Dengan jumlah paket 20 dalam 1 ruang perlu dipertahankan karena dapat meminimumkan kecurangan dalam UN
39	Perlu dibudayakan kejujuran antara guru dan siswa. Selalu percaya diri dalam menghadapi UN, Selalu membekali kesiapan sebelum UN
40	UN harus dilaksanakan dengan jujur, dan UN jangan untuk satu-satunya cara untuk lulus di SMP, SMA/SMK. Perlu keamanan yang kuat melaksanakan UN dengan jujur untuk <i>stakeholder</i> . Harus ada tujuan yang tulus ikhlas apa maksud di dalam UN, jangan di jadikan lahan mencari proyek aja, tapi out come yang diutamakan.
41	Tanamkan nilai-nilai kejujuran dan rasa percaya diri kepada semua siswa
42	Perlunya kesadaran dari semua pihak tentang pentingnya kejujuran dari segala lini dalam pelaksanaan UN
43	Ubah mind set guru dan siswa
44	Hapus sistem UN
45	Pembinaan kepada guru, karyawan dan siswa untuk membiasakan hidup jujur Melaksanakan tugas dengan ikhlas sesuai fakta integritas kejujuran dalam pelaksanaan UN
46	Kecurangan biasanya karena system, bila sistemnya bagus, kecurangan kecil kemungkinan terjadi
47	Pembekalan kepada pelajar dan para pengawas ujian agar melaksanakan sesuai tupoksi
48	Mohon di tindak tegas
49	Saya sangat setuju dengan pakta integritas kejujuran
50	Agar kelulusan diserahkan sepenuhnya pada tingkat satuan pendidikan, Lebih menguji dari aspek sikap dan keterampilan siswa dari pada aspek kognitifnya
51	Pelaksanaan ujian diberi jeda 1 hari dalam setiap mapel

Sumber: Data angket dikumpulkan dan diolah oleh Setyo Hartanto, MKom. tahun 2013.